

LKJIP
2023

RKT
2024

PK
2025

RAK
2024

IKU
2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH

TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com

Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 ;email : kesbangpollinmasseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN

**NOMOR
TAHUN 2023**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2024 - 2026 DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUS KAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam:
1. Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran;

2. Menetapkan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Menyusun Dokumen Perjanjian kinerja;
4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 01 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada Tanggal Juli 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Seruyan,



HARTA SIMA, M.Pd

Pembina Utama Madya, (IV/c)

NIP. 19650228 198812 1 001



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan, bahwa nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten telah berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 63).

Berpedoman pada RPD Kabupaten Seruyan 2024 - 2026 yang merupakan perubahan dari RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023, bahwa Tahun 2025 merupakan periode Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan *Visi* Kabupaten Seruyan selama periode 3 (*tiga*) tahun, yaitu : **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA"**.

Rencana Kinerja Tahun 2025 ada 3 (*tiga*) Sasaran Strategis yang didukung dengan 6 (*Enam*) Program Strategis, 12 (*dua belas*) Kegiatan Strategis dan 38 (*tiga puluh Delapan*) Sub Kegiatan Strategis yang akan diperjanjikan kepada Kepala Daerah untuk dilaksanakan dan dicapai dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 11.914.609.742,- (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) yang bersumber dari APBD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan secara berkelanjutan, diharapkan pada periode lanjutan Renstra SOPD Tahun 2024 - 2026 ini dapat melaksanakan semua sasaran strategis serta program/kegiatan/Sub Kegiatan strategis yang telah ditetapkan.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Seruyan,



HARTA SIMA, M.Pd.

Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19650228 198812 1 001





DAFTAR ISI

<i>Uraian</i>	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Dasar Hukum	5
BAB II PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA	7
A. IKU ESELON II	16
B. IKU ESELON III	27
C. IKU ESELON IV	27
BAB III PENUTUP.....	72
 <u>LAMPIRAN :</u>	
Lampiran I. Surat Keputusan IKU (Salinan/Fotocopy)	
Lampiran II. Tabel Keputusan Penetapan IKU (Salinan/Fotocopy)	





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan (*Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 29 seri D*), bahwa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten telah berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunsn Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 63).

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, yaitu : ***“menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesatuan bangsa dan politik”***.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan ***fungsi***, yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik;
- c. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Social Dan Budaya; Dan
- e. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Social.





Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 telah menyusun perencanaan kinerja yang akan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun ini.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 63), bahwa struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, *membawahi* :
 - a. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Sub. Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
5. Bidang Politik Dalam Negeri;
6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;





7. Kelompok Jabatan Fungsional.

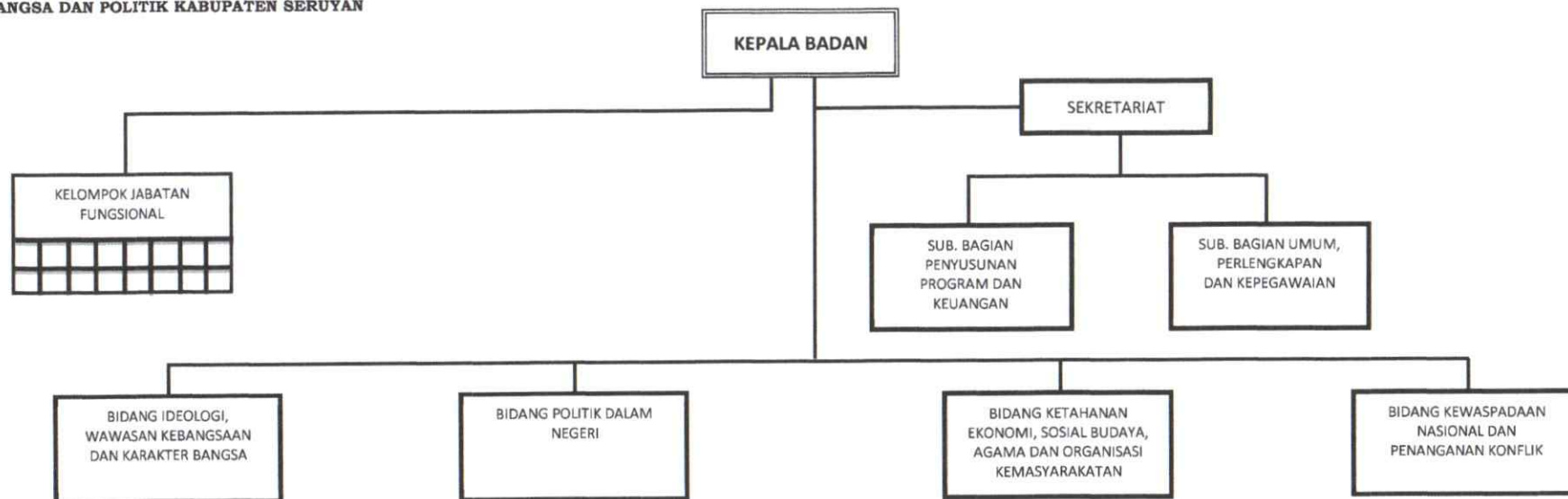
Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada Gambar I.1.





Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SERTA ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN





1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan





Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 73);

10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunsn Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 63).





BAB II

PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA

Dalam perencanaan kinerja hal-hal yang akan diperjanjikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan kepada Kepala Daerah pada tahun 2025 terdiri atas **3 (tiga) Sasaran** dengan **6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU)**, adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Rasa Kesatuan dan Wawasan Kebangsaan Masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatkan Pemahaman Politik Masyarakat

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Perangkat Daerah

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- 1 Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun (%);
- 2 Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan (%);
- 3 Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Selama 3 Tahun (%);
- 4 Persentase Ormas dan LSM yang ber- SKT (%);
- 5 Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik Selama 3 Tahun (%);
- 6 Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran (%).

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 telah menyusun dan menetapkan perencanaan kinerja yang akan diperjanjikan pada Tahun 2025 dengan didukung **6 Program, 12 Kegiatan**, dan **38 Sub Kegiatan** adalah sebagai berikut :

1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**, yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang terdiri atas 4 sub kegiatan, yaitu:
 - o Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;





- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka.

2. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial, yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, yang terdiri atas 4 sub kegiatan, yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.



3. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan etika Serta Budaya politik**, yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu:
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, yang terdiri atas 4 sub kegiatan, yaitu:
 - o Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - o Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
 - o Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
 - o Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.
4. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**, yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu:
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri atas 2 sub kegiatan, yaitu:
 - o Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;



- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
5. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**, yang terdiri atas 1 kegiatan, yaitu :
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang terdiri atas 3 sub kegiatan, yaitu:
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
6. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**, yang terdiri atas 7 kegiatan, yaitu :
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri atas 3 sub kegiatan, yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas 3 sub kegiatan, yaitu:
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas 3 sub kegiatan, yaitu:
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - o Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - o Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri atas 1 sub kegiatan, yaitu:
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri atas 3 sub kegiatan, yaitu:
 - o Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - o Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - o Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri atas 7 sub kegiatan, yaitu:
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - o Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas 4 sub kegiatan, yaitu:
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
 - o Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.





Dalam rangka optimalisasi dalam pencapaian target kinerja yang diperjanjikan tersebut, akan dilaksanakan oleh 4 Bidang dan 1 Kesekretariatan. Adapun ringkasan / ikhtisar rencana kinerja yang akan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Rasa Kesatuan dan Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun	Persen	0,31
		Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen	60
		Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Selama 3 Tahun	Persen	0,30
		Persentase Ormas dan LSM yang ber- SKT	Persen	49,50
2.	Meningkatnya Pemahaman Politik Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik Selama 3 Tahun	Persen	0,38
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran	Persen	100

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.003.489.374
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	2.003.489.374
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	180.205.500
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	38.170.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	31.580.000





	Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
	Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	1.753.533.874
2.	Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	224.971.000
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	224.971.000
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18.632.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	74.751.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	76.258.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	55.330.000
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan etika Serta Budaya politik	2.193.756.900
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.193.756.900
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	49.999.900
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	2.023.428.000





	Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	84.581.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	35.748.000
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	999.834.000
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	999.834.000
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	47.486.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	952.348.000
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	175.069.000
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	175.069.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	55.974.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	58.060.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	61.035.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.317.489.468
	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.967.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.990.000
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.995.000





	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.982.000
	- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.505.500
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.505.500
	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.418.925
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.660.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.090.000
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.668.925
7.	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.571.903.209
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.571.903.209
	- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.289.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	106.110.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	69.179.000
	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.976.110
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.509.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.778.400
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.436.200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.478.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.200.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.300.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.274.000
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.515.912
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	76.201.690
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	76.110.800
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	632.117.244
	Total Pagu Anggaran	11.914.609.742





BAB III PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu dilakukan perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam suatu pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang seharusnya, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tentulah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Dalam perencanaan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025, bahwa hal-hal yang telah diperjanjikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan kepada Kepala Daerah pada tahun 2025 terdiri atas 3 (*tiga*) Sasaran Strategis yang harus dicapai pada pelaksanaan 6 (*enam*) program, 12 (*dua belas*) kegiatan dan 38 (*tiga puluh Delapan*) sub kegiatan tahun 2025.

Demikian dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dibuat, dengan harapan bahwa capaian target kinerja yang telah diperjanjikan dapat tercapai dengan baik melalui pelaksanaan program/kegiatan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, Januari 2025

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Seruyan,**



HARTA SIMA, M.Pd.

Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19650228 198812 1 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARTA SIMA, M. Pd**

Jabatan : Kepala Badan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJAINUDDIN NOOR**

Jabatan : Pj. Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Pj. Bupati Seruyan

DJAINUDDIN NOOR

Pihak Pertama

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik**


HARTA SIMA, M. Pd
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19650228 198812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya rasa kesatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Selama 3 Tahun	0,31
		Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	60
		Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Selama 3 Tahun	0,34
		Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT	49,50
2.	Meningkatnya pemahaman politik masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik Selama 3 Tahun	0,38
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	APBD/APBN
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.003.489.374,00	APBD
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.193.756.900,00	APBD
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	999.834.000,00	APBD
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	175.069.000,00	APBD
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	224.971.000,00	APBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.272.983.968,00	APBD

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Pj. Bupati Seruyan

DJAINUDDIN NOOR

Pihak Pertama

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



HARTA SIMA, M.Pd.

Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19650228 198812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LIPINUS, SE**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARTA SIMA, M.Pd**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik,

HARTA SIMA, M.Pd

Pembina Utama Muda(IV/c)

NIP. 19650228 198812 1 001

Pihak Pertama,

Sekretaris

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

LIPINUS, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19770413 200604 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025

Sekretaris Badan : **LIPINUS, SE**
Tahun Anggaran : **2025**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan administrasi perkantoran	Persen	100

No.	Program/Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	Persen	6.317.489.468
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	154.967.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	4.571.903.209
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	53.505.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	135.418.925
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	175.289.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	430.976.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	795.429.734
J u m l a h				6.317.489.468

Pihak Kedua,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

HARTA SIMA, M.Pd

Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19650228 198812 1 001

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Pertama,

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

LIPINUS, SE

Pembina (IV/a)
NIP. 19770413 200604 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SERI HINDANI, S. Pi**

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LIPINUS, SE**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik,**

LIPINUS, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770413 200604 1 013

Pihak Pertama,

Perencana Ahli Muda,

SERI HINDANI, S. Pi
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19770504 200604 2 031



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TAHUN 2025

Nama JFT : **SERI HINDANI, S. Pi**
Tahun Anggaran : **2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100

No.	Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	109.990.000
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	29.995.000
3.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	14.982.000
J u m l a h				154.967.000

Pihak Kedua,

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

LIPINUS, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770413 200604 1 013

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Pertama,

Perencana Ahli Muda,

SERI HINDANI, S. Pi
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19770504 200604 2 031



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAYDA A.R. SIRAIT, S.Hut**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LIPINUS, SE**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik,**

LIPINUS, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770413 200604 1 013

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Perlengkapan dan Kepegawaian,**

MAYDA A.R. SIRAIT, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19760510 200604 2 021



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH

TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com

Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2025

Kepala Sub Bagian : MAYDA A.R. SIRAIT, S.Hut
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	Persen	100
2.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100
3.	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100
4.	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
5.	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Persen	100

No.	Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57	Paket	106.110.000
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	6	Orang	69.179.000
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	9.509.000
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	14.778.400
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	12.436.200
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Paket	122.478.500
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	Paket	15.200.000
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8	Paket	13.300.000

9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Laporan	243.274.000
10.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	11.000.000
11.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	76.201.690
12.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	4	Laporan	76.110.800
13.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	632.117.244
14.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	Unit	53.505.500
15.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	Unit	73.660.000
16.	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	Unit	43.090.000
17.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	18.668.925
J u m l a h				1.590.619.259.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



LIPINUS, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19770413 200604 1 013

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian,



MAYDA A.R. SIRAIT, S.Hut

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19760510 200604 2 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIWIN DAHLIA, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LIPINUS, SE**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik,**

LIPINUS, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770413 200604 1 013

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Penyusunan
Program dan Keuangan**

WIWIN DAHLIA, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750519 200604 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2025

Kepala Sub Bagian : **WIWIN DAHLIA, SE**
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100

No.	Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23	Orang	4.571.903.209
Jumlah				4.571.903.209

Pihak Kedua,

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

LIPINUS, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770413 200604 1 013

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan,

WIWIN DAHLIA, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750519 200604 2 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PIAU SANDOA, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARTA SIMA, M.Pd**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

PihakKedua,

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik,**



HARTA SIMA, M.Pd
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19650228 198812 1 001

PihakPertama,

**Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa,**

PIAU SANDOA, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19710928 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025

Kepala Bidang : PIAU SANDOA, SE
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan selama 3 Tahun	Persen	0,31

No.	Program/Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	0,31	Persen	2.003.489.374
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0,31	Persen	2.003.489.374
Jumlah				2.003.489.374

Pihak Kedua,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NARTIA SIMA, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650228 198812 1 001

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,

PIAU SANDOA, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19710928 200604 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RABIATUL ADAWIYAH, S.IP**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **PIAU SANDOA, SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa,**

PIAU SANDOA, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19710928 200604 1 008

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Pertama,

Analisis Kebijakan Ahli Muda,

RABIATUL ADAWIYAH, S.IP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840611 201001 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TAHUN 2025

Nama JFT : RABIATUL ADAWIYAH, S.IP
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan wawasan Kebangsaan terhadap masyarakat	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	0,31

No.	Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50	Orang	38.170.000
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	120	Orang	180.205.500
Jumlah				218.375.500

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa,**

PIAU SANDOA, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19710928 200604 1 008

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda,

RABIATUL ADAWIYAH, S.IP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840611 201001 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DEPI MARDIANI, S. STP**

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **PIAU SANDOA, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa,**

PIAU SANDOA, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19710928 200604 1 008

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda,

DEPI MARDIANI, S. STP
Penata Muda Tingkat I, (III/b)
NIP. 19910318 201406 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TAHUN 2025

Nama JFT : DEPI MARDIANI, S. STP
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat terhadap	Persentase Masyarakat yang dibina di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	0,31

No.	Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pembentukan Paskibraka	71	Orang	1.753.533.874
2.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	Laporan	31.580.000
Jumlah				1.785.113.874

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa,

PIAU SANDOA, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19710928 200604 1 008

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda,

DEPI MARDIANI, S. STP
Penata Muda Tingkat I, (III/b)
NIP. 19910318 201406 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ADAM MALIK, SP**

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARTA SIMA, M.Pd**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

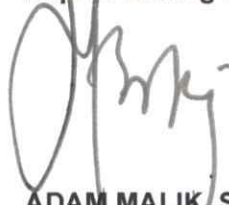
Pihak Kedua,

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik,**


HARTA SIMA, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650228 198812 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,


ADAM MALIK, SP
Pembina (IV/a)
NIP. 19720629 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025

Kepala Bidang : **ADAM MALIK, SP**
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik selama 3 Tahun	Persen	0,38

No.	Program/Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan etika Serta Budaya politik	0,38	Persen	2.193.756.900
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	0,38	Persen	2.193.756.900
J u m l a h				2.193.756.900

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

HARTA SIMA, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650228 198812 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,

ADAM MALIK, SP
Pembina (IV/a)
NIP. 19720629 200003 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASY SYAUKANI, SP**

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADAM MALIK, SP**

Jabatan : Kepala Bidang Politik dalam Negeri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

ADAM MALIK, SP

Pembina (IV/a)

NIP. 19720629 200003 1 002

Pihak Pertama

Analis Kebijakan Ahli Muda,

ASY SYAUKANI, SP

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19821108 200903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TAHUN 2025

Nama JFT : **ASY SYAUKANI, SP**
Tahun Anggaran : **2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Masyarakat yang mendapatkan pendidikan Politik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik (Jumlah Masyarakat yg mendapatkan Pembinaan Politik /Jumlah Masyarakat yg berusia minimal 17 Tahun (Hak Pilih) x 100%)	Persen	0,38

No.	Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2	Dokumen	49.999.900
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	130	Orang	2.023.428.000
Jumlah				2.073.427.900

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,

ADAM MALIK, SP
Pembina (IV/a)
NIP. 19720629 200003 1 002

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda,

ASY SYAUKANI, SP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19821108 200903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITRI LESTARI, S.A.P**

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADAM MALIK, SP**

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,

ADAM MALIK, SP

Pembina (IV/a)

NIP. 19720629 200003 1 002

Pihak Pertama,

Analis Kebijakan Ahli Muda,

FITRI LESTARI, S.A.P

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19831008 201001 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU TAHUN 2025

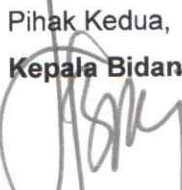
Nama JFT : FITRI LESTARI, S.A.P
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Masyarakat yang mendapatkan pendidikan Politik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Politik (Jumlah Masyarakat yg mendapatkan Pembinaan Politik /Jumlah Masyarakat yg berusia minimal 17 Tahun (Hak Pilih) x 100%)	Persen	0,38

No.	Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	80	Orang	84.581.000
3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	4	Laporan	35.748.000
J u m l a h				120.329.000

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,


ADAM MALIK, SP
Pembina (IV/a)
NIP. 19720629 200003 1 002

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda,


FITRI LESTARI, S.A.P
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831008 201001 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SIMANTO, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARTA SIMA, M.Pd**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



HARTA SIMA, M.Pd

Pembina Utama Madya (IV/c)

NIP. 19650228 198812 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi,

SIMANTO, SE

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19700416 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025

Kepala Bidang : **SIMANTO, SE**
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya selama 3 Tahun	Persen	0,34
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT	Persen	49,50

No.	Program/Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,34	Persen	175.069.000
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,34	Persen	175.069.000
2.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	49,50	Persen	999.834.000
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	49,50	Persen	999.834.000
J u m l a h				1.174.903.000

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi,

SIMANTO SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700416 200604 1 005



Pihak Kedua,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

HARTA SIMA, M.Pd
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19650228 198812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUDI HERIANTO, S.Kom**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SIMANTO, SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Ketahanan Sosial
Budaya dan Ekonomi,**

SIMANTO, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700416 200604 1 005

Pihak Pertama,

Analisis Kebijakan Ahli Muda,

BUDI HERIANTO, S.Kom
Penata Tingkat I, (III/d)
NIP. 19800302 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TAHUN 2025

Nama JFT : **BUDI HERIANTO, S.Kom**
Tahun Anggaran : **2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya / Jumlah Penduduk x 100%)	Persen	0,34

No.	Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	185	Orang	55.974.000
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80	Orang	58.060.000
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	Laporan	61.035.000
Jumlah				175.069.000

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi,

SIMANTO, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700416 200604 1 005

Pihak Pertama,

Analisis Kebijakan Ahli Muda,

BUDIHERIANTO, S.Kom
Penata Tingkat I, (III/d)
NIP. 19800302 201001 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **TIUR SIRAIT, SE**

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SIMANTO, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Ketahanan Sosial
Budaya dan Ekonomi**

SIMANTO, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700416 200604 1 005

Pihak Pertama,

Analis Kebijakan Ahli Muda,

TIUR SIRAIT, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750327 201001 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TAHUN 2025

Nama JFT : TIUR SIRAIT, SE
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Ormas dan LSM yang ber-SKT	Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT (Jumlah Ormas yg ber-SKT / Jumlah Ormas yg Terdata x 100%)	Persen	49,50

No.	Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang, Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Dan Ormas Asing Di Daerah	2	Dokumen	47.486.000
2.	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	155	Orang	952.348.000
Jumlah				999.834.000

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi,

SIMANTO SE

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19700416 200604 1 005

Pihak Pertama,

Analisis Kebijakan Ahli Muda,

TIUR SIRAIT, SE

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19750327 201001 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MECKY PRAMITA, SSTP**

Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HARTA SIMA, M.Pd**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik,



HARTA SIMA, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650228 198812 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik,

MECKY PRAMITA, SSTP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841208 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025

Kepala Bidang : MECKY PRAMITA, SSTP
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial Yang Di Selesaikan	Persen	60

No.	Program/Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	60	Persen	224.971.000
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	60	Persen	224.971.000
Jumlah				224.971.000

Kuala Pembuang, Januari 2025

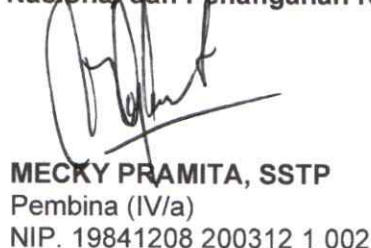
Pihak Kedua,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,


HARTA SIMA, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660228 198812 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,


MECKY PRAMITA, SSTP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841208 200312 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FACHRUDIN NOOR, S.Sos**

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MECKY PRAMITA, SSTP**

Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik,**

MECKY PRAMITA, SSTP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841208 200312 1 002

Pihak Pertama,

Analis Kebijakan Ahli Muda,

FACHRUDIN NOOR, S.Sos
Penata Tingkat I, (III/d)
NIP. 19861027 201001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN MOH. HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : kesbangpolkabseruyan@gmail.com
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TAHUN 2025

Nama JFT : **FACHRUDIN NOOR, S.Sos**
Tahun Anggaran : **2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Konflik Sosial Yang Di Tangani	Peresentase Konflik Sosial Yang Di Tangani	Persen	60

No.	Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	Dokumen	18.632.000
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11	Orang	74.751.000
3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70	Orang	76.258.000
4.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	4	Laporan	55.330.000
Jumlah				224.971.000

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,

MECKY PRAMITA, SSTP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841208 200312 1 002

Pihak Pertama,

Analisis Kebijakan Ahli Muda,

FACHRUDIN NOOR, S.Sos
Penata Tingkat I, (III/d)
NIP. 19861027 201001 1 002